

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah menitikberatkan kebijakannya pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mampu mencukupi kebutuhan pokok mereka dengan layak, serta dapat memperbaiki taraf hidup mereka dan keluarganya. Harapannya, upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan, sehingga Indonesia mampu bersaing di kancah global, terutama di era globalisasi seperti sekarang. Fokus pembangunan yang ideal harus mencakup pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ekonomi harus dibangun dengan prinsip keadilan, sehingga distribusi pendapatan bisa merata di kalangan masyarakat (Redana & Suprpta, 2022).

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang timbul akibat ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi, termasuk pengangguran dan ketidakseimbangan pendapatan. Hal ini menjadi tantangan signifikan bagi banyak negara untuk memperkuat ekonomi mereka, agar tidak semakin tertinggal di tengah perubahan zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, isu kemiskinan ini sangat krusial dan memerlukan perhatian serta penanganan yang serius agar dapat diatasi secara efektif (Anugrah et al., 2022). Selain itu, kemiskinan juga menjadi hambatan dalam proses pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan nasional sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mencakup semua aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Maret 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2024 mencapai 95,91 ribu jiwa. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tahun ini berkurang dari jumlah penduduk miskin tahun 2023, begitu juga secara persentase menurun. Persentase

penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2024 sebesar 8,16 persen, berkurang 0,53 persen poin bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar 8,69 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar mengalami penurunan dari 8,69 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 8,16 persen pada bulan Maret 2024. Garis Kemiskinan di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 408.399,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 20.666,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,33 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 387.733,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar Maret 2024 sebesar 0,80 mengalami penurunan sebesar -0,41 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 1,21 poin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar Maret 2024 sebesar 0,12, mengalami penurunan sebesar -0,12 poin dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,24 (BPS Kabupaten Blitar, 2023).

Sebagai bagian dari tujuan nasional yang diatur dalam undang-undang tahun 1945, kemiskinan diakui sebagai masalah sosial yang perlu ditangani secara berkelanjutan, mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Jeprianus et.al, 2023). Oleh karena itu, pemerintah merancang berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu program yang diimplementasikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT adalah program bantuan pemerintah yang memberikan uang tunai atau bentuk bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tanpa syarat, kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, terutama yang menghadapi tantangan di tingkat lokal. Sebagai kebijakan nasional, BLT memiliki landasan pelaksanaan yang jelas, baik dari sisi analisis kondisi maupun dari segi penerapan hukum. Dalam konteks analisis, BLT merupakan langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menanggapi masalah kemiskinan yang juga dialami oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia (Anugrah et al., 2022).

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dirancang secara sentralistik untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tingkat lokal dan bisa

memicu konflik sosial. Salah satu masalah utama adalah ketidakpuasan warga, di mana beberapa orang yang seharusnya memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak layak malah terdaftar sebagai penerima. Masalah ini sering kali disebabkan oleh data yang tidak akurat atau tidak terbaru dari pemerintah pusat, yang menyebabkan rumah tangga yang dulunya miskin mungkin sudah lebih mapan (Ningsih, 2022).

Program BLT tampak sebagai solusi darurat yang dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah, terutama karena waktu yang sangat terbatas untuk memverifikasi data rumah tangga yang layak. Badan Pusat Statistik (BPS) hanya memiliki waktu satu bulan untuk menyiapkan segala sesuatu, mulai dari verifikasi data hingga penyiapan stiker sebagai tanda penerima BLT dan penyampaian data kepada instansi pemerintah terkait. Akibatnya, muncul masalah di lapangan seperti ketidakakuratan pendataan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap program ini, yang sering kali disertai dengan ancaman dan kekerasan terhadap pihak BPS, RT/RW, serta perangkat desa, menyebabkan ketegangan dan perpecahan di antara warga (Masambe, Tulus, & Plangiten, 2021).

Pada tahun 2020, Presiden Jokowi memperkenalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai oleh Dana Desa sebagai upaya mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dengan memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020. Peraturan ini merevisi aturan sebelumnya, yakni Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019, yang menekankan prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk untuk pemberian BLT. Untuk memastikan pelaksanaan BLT-Dana Desa berjalan dengan efektif, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan tambahan seperti Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di desa, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020 yang menggantikan PMK Nomor 205 Tahun 2019 terkait pengelolaan Dana Desa.

Di tengah situasi ekonomi yang mendesak, BLT Dana Desa perlu disalurkan secara cepat dan tepat, dengan dukungan data yang valid. Oleh karena

itu, disusun Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pendataan penerima bantuan sesuai peraturan. Selain itu, kegiatan dan anggaran Dana Desa selama pandemi diubah untuk fokus pada pencegahan dan penanganan Covid-19, termasuk pemberian BLT kepada masyarakat miskin yang terdampak.

Perubahan regulasi juga mencakup penyesuaian dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020, PMK Nomor 40 yang kemudian direvisi menjadi PMK Nomor 50 Tahun 2020, dan Instruksi Kemendagri Nomor 3 Tahun 2020. BLT Dana Desa memberikan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan pertama, dan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan berikutnya bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Jika ada kebutuhan tambahan, Kepala Desa dapat mengusulkan penambahan alokasi BLT kepada Bupati atau Wali Kota, dengan keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai dasar usulan.

Kriteria penerima termasuk kehilangan mata pencaharian, belum terdaftar, dan memiliki penyakit kronis, dengan memperhatikan data dari Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) Kementerian Sosial. Calon penerima juga harus dipastikan tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial, atau program lain. Pendataan dilakukan oleh Kasi Kesra, Kadus, RT, dan PSM, kemudian dibahas dalam musyawarah khusus dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BHP (BPD). Usulan ini lalu diserahkan ke camat untuk diteruskan kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) (Iswanto, 2021).

Adanya program bantuan tunai langsung ini diharapkan roda perekonomian masyarakat bisa kembali berputar, serta daya beli yang sempat menurun dapat kembali normal. Bantuan ini diharapkan digunakan secara bijak oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama sembako, guna menghidupi keluarga. Penting bagi penerima bantuan untuk tidak menyalahgunakan dana tersebut, misalnya untuk berjudi, membeli minuman keras, rokok, atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan maksud pemerintah dalam memberikan bantuan.

Salah satu tantangan yang dihadapi di lapangan adalah minimnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan setelah disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah desa mengalami kesulitan dalam memonitor penggunaan dana secara menyeluruh, sehingga ada kemungkinan bantuan disalahgunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak, seperti rokok, alkohol, atau perjudian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, serta evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan, agar tujuan program ini dapat tercapai dengan efektif.

Kebijakan publik adalah proses yang diambil pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yang merupakan hasil dari proses politik dalam penyelenggaraan negara. William N. Dunn menyebutkan bahwa tahap-tahap kebijakan publik mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah dan mencapai hasil yang diinginkan, serta dilakukan pada setiap tahapan kebijakan, tidak hanya di akhir. Evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama: (a) menggambarkan dampak dan konsekuensi dari kebijakan, dan (b) menetapkan kriteria dan standar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan (Iswanto, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Besuki. Evaluasi ini penting untuk menentukan sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang membutuhkan. Dalam proses evaluasi, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi terkait efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program BLT. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang apakah program tersebut berhasil atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi, akan diambil keputusan mengenai kelanjutan program: apakah perlu diteruskan, diperbaiki untuk meningkatkan kinerjanya, atau dihentikan jika tidak memberikan manfaat yang signifikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 di Desa Besuki Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 di Desa Besuki Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Riset ini dapat memberikan manfaat teoritis ataupun praktis, berikut manfaat dari riset ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari riset ini bisa dipergunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait evaluasi terhadap program Bantuan Tunai Langsung, dan riset ini dapat menjadi acuan juga penjelasan untuk pihak yang berkeinginan.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam program BLT, sehingga pemerintah atau lembaga penyelenggara bisa melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas bantuan. Penelitian memberikan data yang akurat tentang penggunaan dan dampak BLT, membantu mengurangi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam distribusi bantuan. Temuan dari evaluasi dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih baik di masa depan, berdasarkan bukti nyata tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Kebijakan Publik**

Menurut Carl Friedrich (Agustina & Hendra, 2021), kebijakan publik adalah panduan tindakan yang dirancang atau diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dan dapat menghadapi berbagai hambatan serta peluang. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Proses kebijakan publik umumnya melibatkan tiga tahap utama: formulasi, yaitu perumusan kebijakan; implementasi, yaitu pelaksanaan kebijakan; dan evaluasi, yaitu penilaian hasil kebijakan. Menurut Grindle dan Tangkilisan (Putri et.al, 2023), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang direncanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang bisa berupa dukungan maupun hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **2. Evaluasi Program**

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart dalam (Winarno, 2016), evaluasi memainkan peran krusial dalam pelaksanaan program. Fungsinya adalah untuk menemukan penyebab di balik kegagalan program atau mengevaluasi apakah program tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, evaluasi berfungsi untuk menilai dampak dari kegiatan yang dilakukan dan mengukur keberhasilan atau kegagalan program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Charles O. Jones dalam (Masambe et al., 2021), evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk memahami serta memperbaiki pengembangan dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi memungkinkan kita untuk menilai apakah program telah mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dasar untuk memutuskan apakah kebijakan atau kegiatan tersebut perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

Menurut Rossi dan Freeman dalam (Wibawa, 2017), evaluasi program harus mampu menjawab beberapa pertanyaan esensial, seperti:

bagaimana desain dan konsep programnya, bagaimana pelaksanaannya (termasuk aspek monitoring dan akuntabilitas), serta bagaimana kegunaan program dalam hal dampak dan efisiensi. Dalam mengevaluasi suatu program, penting bagi peneliti untuk menetapkan nilai berdasarkan kriteria tertentu. Dengan kata lain, evaluasi yang efektif memerlukan adanya tujuan yang jelas (goals) dan kriteria (criteria) yang spesifik. Tujuan menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam program, baik dalam bentuk umum maupun numerik, sedangkan kriteria memastikan bahwa tujuan tersebut ditetapkan dengan baik dan dapat dipenuhi secara memuaskan. William N. Dunn (Maryam & Cahyani, 2022) mengemukakan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, yang meliputi:

1). Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan seberapa sukses program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

2). Efisiensi

Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan.

3). Kecukupan

Kecukupan berhubungan erat dengan seberapa efektif suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4). Perataan

Kriteria perataan mengedepankan pentingnya keadilan dalam penerapan kebijakan publik di semua lapisan masyarakat.

5). Responsivitas

Responsivitas berfokus pada seberapa baik suatu kebijakan dapat menjawab kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tertentu di masyarakat.

#### 6). Ketepatan

Ketepatan mengacu pada seberapa efektif suatu kebijakan publik dapat menyelesaikan masalah yang ada.

### **3. Bantuan Langsung Tunai**

BLT adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan kriteria tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan ini disalurkan langsung melalui kantor pos dengan nilai Rp 100.000 per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Program BLT pertama kali diatur dalam Inpres No.12 Tahun 2005. Inpres ini menetapkan bahwa Bappenas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan rencana dan organisasi pelaksanaan program tersebut. Presiden juga memerintahkan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memberikan dukungan serta mengawasi pelaksanaan program. Selain itu, Mendagri mengeluarkan surat No. 413.3/1941/SJ pada 1 Agustus 2005, yang meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyiapkan kepala desa, ketua RW, dan ketua RT sebagai petugas lapangan yang akan membantu BPS dalam proses pendaftaran.

BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau bantuan lainnya, baik dengan syarat tertentu (conditional cash transfer) maupun tanpa syarat (unconditional cash transfer), untuk membantu masyarakat miskin. Program ini pertama kali diperkenalkan di Brasil dan kemudian diadopsi oleh banyak negara, dengan jumlah bantuan dan mekanisme yang bervariasi sesuai kebijakan masing-masing pemerintah. BLT Dana Desa (BLT-DD) adalah salah satu bentuk bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga miskin di desa, dengan pendanaannya berasal dari Dana Desa, bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Keluarga yang memenuhi kriteria akan menerima Rp600.000 per bulan selama tiga bulan pertama, dan Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya, tanpa dikenakan pajak (Maryam & Cahyani, 2022).

## **F. Definisi Operasional**

Evaluasi program BLT Tahap 1 di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

1.1. Desain dan Konsep Program BLT di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

1.2. Pelaksanaan program BLT

1.2.1 Monitoring Program BLT Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

Pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran dana BLT dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Rekrutmen data bagi calon penerima BLT tahap 1 di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.
2. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) penerima BLT di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
3. Penyaluran dan pencairan dana di Kantor Pos Indonesia.

1.3.1 Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di

1.3.1.1. Dampak Negatif di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

1. Bantuan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang kurang mampu
2. Adanya kelemahan dalam proses pendataan dan penyaluran.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkadang tidak dikelola sesuai dengan kebutuhan, sehingga beberapa penerima

malah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak mendesak.

4. Terdapat kecenderungan di kalangan sebagian masyarakat untuk menjadi lebih bergantung pada BLT, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk berusaha mandiri.
5. Keterlambatan pencairan dana tanpa pemberitahuan yang memadai dari pemerintah juga menjadi masalah tersendiri.

#### 1.3.1.2 Dampak Positif di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

1. Bantuan Langsung Tunai memberikan masyarakat akses terhadap dana pemerintah yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Beberapa penerima bahkan menggunakan bantuan ini untuk meningkatkan modal usaha kecil, yang menunjukkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk hal yang produktif.
3. Pemanfaatan yang tepat, bantuan ini berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi bagi keluarga-keluarga kurang mampu.

#### 1.3.2 Efisiensi BLT di Desa Besuki, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar

- 1.3.2.1 Kemampuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya demi mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang diperlukan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata yang sedang berlangsung di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan data yang lebih akurat tentang isu yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis dan deskripsi yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta observasi perilaku subjek. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memahami fenomena secara menyeluruh melalui deskripsi verbal dalam konteks alami, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk analisis (Sugiyono, 2020).

Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi informasi secara mendalam dan bersifat terbuka terhadap beragam perspektif. Penelitian ini memungkinkan partisipan mengungkapkan pemikiran mereka secara bebas terkait suatu topik, tanpa arahan yang mengikat. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena melalui pengumpulan data yang rinci. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada jumlah sampel atau populasi yang besar; bahkan, sampel yang terbatas dianggap memadai selama data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti, sehingga penambahan sampel tidak diperlukan. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas dalam penggunaan metode kualitatif, seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memperoleh sumber datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2018).

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik, termasuk penerapan metode seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen (Moleong, 2018). Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber. Alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data meliputi ponsel, kamera, dan alat tulis seperti notebook dan pena.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap makna yang terbentuk di antara individu atau kelompok dalam konteks masalah sosial tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh (Creswell, 2019), penelitian kualitatif sering kali digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep-konsep, fenomena, serta masalah sosial yang kompleks. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam, menemukan dan memahami hal-hal tersembunyi yang sering kali sulit diungkap. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan, yang mengharuskan pengumpulan data secara mendalam dan menyeluruh. Fenomenologi berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu peristiwa, aktivitas, proses, atau program tertentu dalam kerangka waktu yang ditetapkan.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilaksanakan di bulan September tahun 2024 di Desa Besuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar

## **3. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2018), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan para partisipan, sedangkan dokumen dan sumber lainnya berfungsi sebagai data pelengkap. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini mengandalkan

dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli menggunakan berbagai instrumen, seperti observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Data ini diperoleh langsung dari informan atau sumber utama, yang secara langsung menyediakan informasi kepada peneliti. Data primer merujuk pada informasi yang langsung diberikan oleh sumbernya kepada peneliti. Peneliti mengumpulkan data ini secara langsung dari sumber pertama atau lokasi penelitian. Biasanya, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan terkait topik yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020)

Data primer merujuk pada informasi, menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan para partisipan, sedangkan dokumen dan sumber lainnya berfungsi sebagai data pelengkap. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari informan.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang berfungsi untuk melengkapi data primer, yang diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi, serta berbagai sumber seperti buku, majalah, koran, dan arsip yang relevan dengan objek penelitian. Sumber sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, tetapi melalui pihak lain atau dokumen. Dengan memanfaatkan sumber data sekunder, peneliti dapat lebih mudah mengumpulkan informasi dan menganalisis hasil penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan tingkat validitas penelitian pun meningkat. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2020). Ini

mencakup catatan, buku, makalah, dokumen terkait, serta sumber online seperti jurnal dan skripsi yang telah dipublikasikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber data yang telah disebutkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Moleong, 2018) meliputi:

##### **1. Observasi**

Salah satu cara untuk memahami atau meneliti perilaku non-verbal adalah dengan menggunakan teknik observasi. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari teknik lainnya. Observasi tidak hanya fokus pada manusia, tetapi juga dapat diterapkan pada objek-objek alam lainnya. Melalui observasi, peneliti dapat mengeksplorasi perilaku dan menggali makna yang terkandung di dalamnya.

Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan cara yang sistematis dan akurat, sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk penelitian ini, observasi difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT).

##### **2. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2020), dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, serta gambar yang berfungsi sebagai laporan dan keterangan untuk mendukung penelitian. Studi dokumen berperan sebagai pelengkap bagi metode observasi atau wawancara dan dapat meningkatkan keandalan serta kredibilitas penelitian, terutama jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang relevan. Namun, tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang mungkin tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena foto tersebut bisa jadi diambil untuk tujuan tertentu.

Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari individu. Contoh dokumen berbentuk tulisan antara lain catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen dalam bentuk gambar termasuk foto, gambar bergerak, dan sketsa. Karya seni, seperti lukisan, patung, dan film, juga dapat dianggap sebagai dokumen. Dalam konteks penelitian kualitatif, studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara (Arikunto, 2019).

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode ini melibatkan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan yang relevan. Menurut Sugiyono (2020), wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana komunikasi berlangsung secara langsung melalui pertanyaan mengenai objek yang sedang diteliti.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti saat ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, serta untuk menggali informasi lebih dalam dari responden, terutama ketika jumlah responden terbatas. Metode ini mengandalkan laporan diri atau self report, serta pengetahuan dan keyakinan pribadi (Arikunto, 2019). Wawancara bisa dilaksanakan dengan cara terstruktur, baik secara langsung (*face to face*) maupun melalui telepon.

Teknik wawancara melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh data yang diperlukan.

### 5. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menerapkan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, data dan informasi

dikumpulkan dari berbagai sumber melalui metode pengumpulan yang beragam (triangulasi), dan proses ini dilakukan secara berkelanjutan hingga informasi yang diperoleh dianggap cukup atau jenuh. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga semua aspek selesai, sehingga data yang dikumpulkan mencapai tingkat kejenuhan yang diinginkan. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) menjelaskan bahwa analisis data melibatkan tiga tahap utama yang berlangsung secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2020), reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian yang melibatkan penyaringan dan pengorganisasian informasi untuk menyoroti elemen-elemen yang paling relevan dengan topik yang sedang diteliti. Proses ini mencakup identifikasi tema dan pola yang muncul, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan membantu peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam proses reduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, reduksi data memerlukan kemampuan berpikir kritis serta pemahaman yang mendalam.

Reduksi data adalah proses di mana peneliti memilih dan menyederhanakan informasi mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian masih berjalan, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus dan menata data dengan lebih efektif. Hasil dari reduksi data berupa ringkasan yang mencakup catatan awal serta informasi tambahan yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang temuan penelitian (Moleong, 2018).

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format, seperti tabel, grafik, diagram alir, atau pictogram. Penyajian data dalam

bentuk ini membantu mengorganisir informasi dan menyusun hubungan yang jelas, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, data juga bisa disajikan melalui uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Namun, format yang paling sering digunakan adalah teks naratif, yang memungkinkan data terorganisasi dengan baik dan memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disajikan(Sugiyono, 2020).

Penyajian data adalah tahap pengorganisasian informasi yang memfasilitasi penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola signifikan yang dapat membantu dalam membuat kesimpulan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, informasi sering kali disajikan dalam format teks naratif, tetapi juga dapat menggunakan bentuk lain seperti matrik, diagram, tabel, atau bagan untuk menyampaikan data dengan lebih jelas(Moleong, 2018).

### 3. Menarik Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis penelitian kualitatif adalah proses penarikan kesimpulan. Berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2020), kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di awal, namun tidak selalu demikian, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan berlangsungnya penelitian di lapangan. Kesimpulan tersebut berisi temuan baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi, dan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang awalnya tidak jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian, informasi tersebut menjadi lebih jelas dan terperinci. Verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan melibatkan proses interpretasi, yang bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah disajikan sebelumnya(Moleong, 2018).